

Protokol Sekolah dan Madrasah

RANGKUL

dalam Mengenal dan Merespon Tanda-Tanda Rentan Ekstremisme
Kekerasan di Sekolah dan Madrasah



Protokol Sekolah dan Madrasah

RANGKUL

dalam Mengenal dan Merespon Tanda-Tanda Rentan Ekstremisme
Kekerasan di Sekolah dan Madrasah

2019

PROTOKOL SEKOLAH DAN MADRASAH
RANGKUL: dalam Mengenal dan Merespon Tanda-Tanda Rentan
Ekstremisme Kekerasan di Sekolah dan Madrasah

PENANGGUNG JAWAB

Erita Narhetali

PENYUSUN

Erita Narhetali

Ronny

Annas Jiwa Pratama

Muhammad Akhyar

DESAIN

Ronny

Hak Cipta

© RANGKUL 2019

DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
TUJUAN	2
A. MEMAHAMI EKSTREMISME KEKERASAN	3
1. Definisi	3
2. Radikalisasi Menuju Ekstremisme Kekerasan	5
3. Media Penyebaran	9
B. PENTINGNYA MERESPON EKSTREMISME KEKERASAN	11
1. Skema Hubungan Antarvariabel	11
2. Pendekatan Social and Emotional Learning (SEL)	11
3. Pendekatan Early Warning and Early Respon System (EWERS)	13
C. MENGENALI TANDA-TANDA RENTAN EKSTREMISME KEKERASAN DI SEKOLAH DAN MADRASAH	15
D. STRATEGI PENCEGAHAN DAN MERESPON TANDA-TANDA RENTAN EKSTREMISME KEKERASAN DI SEKOLAH DAN MADRASAH	19
1. Kurikulum dan Pengajaran	19
2. Aktivitas Kesiswaan	20
3. Sistem Deteksi dan Respon Dini	20
E. RANGKUL: SISTEM DETEKSI DAN RESPON DINI	21
1. Mengenali RANGKUL sebagai Sistem	21
2. Prinsip–Prinsip RANGKUL	22
3. Pelaksana dan Proses Program RANGKUL	23
a. Komite RANGKUL	24
1) Tugas pokok dan fungsi	24
2) Struktur organisasi dan uraian tugas	24
3) Mekanisme kerja	27
b. Komite Gabungan	28
1) Tugas pokok dan fungsi	28
2) Komposisi	29
3) Mekanisme kerja	29
4) Rencana intervensi	30
5) Persetujuan partisipasi	31
6) Monitoring dan evaluasi	31

DAFTAR ISI

7) Pendanaan	32
8) Berbagi pengalaman	32
c. Jejaring Eksternal	32
d. Proses RANGKUL	32
Baca Lebih Lanjut	35
Kontak dan Informasi	37

**The highest result
of education is
tolerance**

-Helen Keller-

PENGANTAR

Topik intoleransi beragama dan radikalisme telah menjadi bahan kajian yang serius sejak lebih dari satu dekade yang lalu. Hal ini dipicu oleh berbagai peristiwa intoleransi, pelanggaran kebebasan beragama, serta berbagai aksi kekerasan terorisme yang melanda berbagai daerah di Indonesia. Sejauh ini, selain kepada kelompok agama eksternal, di Indonesia fokus utama isu intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama yang ada adalah pada kelompok internal agama. Sedangkan dalam konteks radikalisme kebanyakan yang dibicarakan adalah gagasan khilafah dan penegakan syariat Islam sebagai dasar negara, di antaranya isu tentang HTI, sementara isu ekstremisme kekerasan oleh kelompok-kelompok jihad kekerasan seperti ISIS dsb. Dari sejumlah temuan studi yang dilaksanakan antara tahun 2015 hingga 2018 ini didapat gambaran bahwa intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia cukup besar, cenderung meningkat, dan juga ditemukan di dunia pendidikan (pada guru maupun siswa) di semua jenjang pendidikan¹.

Hubungan antara intoleransi dengan radikalisme dapat dilihat dari rangkaian proses aktivitasnya. Untuk konteks Indonesia, sejauh ini dapat dilihat bahwa konflik-konflik paham keagamaan memiliki pola yang mirip, yaitu diawali dari penyebaran kebencian, dilanjutkan tindakan penyesatan, dan diikuti kemudian oleh kekerasan massa atau kriminalisasi korban oleh aparat penegak hukum². Hal ini mengindikasikan bahwa upaya untuk menangkal kekerasan konflik beragama mesti diawali dengan upaya mencegah penyebaran kebencian. Oleh karena itu, untuk memastikan efektivitas pencegahan kekerasan berbasis ekstremisme apa pun, termasuk agama, harus dimulai dari intervensi yang mendorong sikap toleransi terhadap perbedaan serta menghentikan arus kampanye kebencian.

Salah satu bentuk intervensi yang dilakukan oleh negara melalui BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) adalah melalui program pencegahan yang dilakukan dengan menggunakan metode **soft power** atau pendekatan lunak dimana-

¹ Lihat misalnya studi dari Setara Institute (2015, 2016), PPIM UIN (2017, 2018), Alvira (2017) dan LIPI (2018)

² Azhari, M.S., & Ghozali, M.F. (2019). Peta Kuasa Intoleransi dan Radikalisme Indonesia. Penerbit Inklusif. The Asia Foundation.

anak muda diajak untuk berpartisipasi sebagai duta damai dunia maya³ dan pelibatan mantan teroris dalam upaya deradikalisasi, disamping upaya-upaya sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk ke sekolah/madrasah dan universitas. Lebih lanjut, Kemenag bersama Kemendikbud dan BNPT menandatangani MoU Kerja sama tiga lembaga negara dalam upaya mencegah dan menangani penyebaran paham radikal dan intoleransi melalui pendidikan moderasi agama.⁴

Sejalan dengan itu, penguatan guru dan siswa sebagai individu serta sekolah dan madrasah sebagai institusi adalah prasyarat penting bagi tercapainya tujuan program pencegahan radikalisme menuju ekstremisme kekerasan di sektor pendidikan. Upaya ini juga sejalan dengan strategi peningkatan mutu pendidikan dan moderasi beragama di sekolah dan madrasah.

TUJUAN

Radikalisasi dan ekstremisme kekerasan adalah masalah yang kompleks, sehingga sulit untuk menemukan satu solusi sempurna untuk mengatasinya. Namun, meningkatkan kemampuan sekolah dan madrasah mengenali dan merespon tanda-tanda kerentanan atas radikalisme dan ekstremisme kekerasan akan dapat mengurangi dan mencegah pengaruh atas dampak paparan narasi atau potensi ekstremisme terhadap siswa. Beranjak dari sini, PPIM menyusun sebuah program pencegahan ekstremisme kekerasan dalam bentuk Protokol Sekolah dan Madrasah RANGKUL ini.

Protokol ini bertujuan untuk:

- 1. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mencegah ekstremisme kekerasan di sekolah dan madrasah, serta mengurangi dan mencegah pengaruh pesan dan narasi yang berpotensi ekstrem terhadap siswa.**
- 2. Sebagai bagian dari upaya pencegahan ekstremisme kekerasan dalam bentuk rekomendasi Standar Operasional Prosedur (SOP) deteksi dan respon dini untuk sekolah dan madrasah.**

³ lihat lebih lanjut di <https://www.bnpt.go.id/?s=duta+damai>

⁴ lihat lebih lanjut di <https://kemenag.go.id/berita/read/508158>

A. MEMAHAMI EKSTREMISME KEKERASAN

1. Definisi

Protokol ini menggunakan beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan, yang diambil dari beberapa referensi dari badan dunia, jurnal akademik, kamus dan *Non Government Organization* (NGO). Hal ini dikarenakan belum ada konsensus nasional di Indonesia mengenai istilah-istilah tersebut, sementara istilah-istilah seperti radikalisme, terorisme ataupun ekstremisme terkadang dipergunakan tidak tepat oleh media-media *mainstream* dan negara.^{5 6}

Intoleransi

Secara singkat Intoleransi dapat dipahami sebagai sikap tidak menerima segala sesuatu yang berbeda dengan yang individu ketahui dan yakini sebagai sebuah kebenaran. Pada umumnya disertai dengan tindakan seperti pelecehan, penghinaan, perlakuan tidak adil/ diskriminatif sampai pelarangan praktik ibadah.

Radikalisme

Paham bahwa norma, struktur sosial, politik dan pemerintahan mesti diubah melalui cara yang revolusioner dan mengakar. Radikalis masih memungkinkan cara-cara seperti dialog atau jalur legal dalam melakukan perubahan. Namun, pada saat yang sama bisa mengarahkan partisipan radikal menggunakan kekerasan.

Radikalisasi

Proses penanaman nilai, cita-cita dan aspirasi politik, agama atau sosial yang ekstrem terhadap individu atau kelompok untuk menolak *status quo*/ nilai-nilai konvensional yang dianut oleh negara dan masyarakat pada umumnya

⁵ lihat <https://tirto.id/sudah-tepatkah-kita-menggunakan-istilah-radikalisme-cPHG>;

⁶ Böttcher. A (2017). Towards Academic Consensus Definitions of Radicalism and Extremism. volume 11, issue 4

Ekstremisme

Paham anti kemanan, jauh dari sikap dan perilaku masyarakat pada umumnya dimana tidak ada ruang bagi perbedaan. Ekstremisme ditandai dengan sikap dogmatis, intoleran, melegitimasi kekerasan sebagai cara mencapai kekuasaan, tertutup, tidak menghargai kehidupan dan hak orang lain, dan segala hal yang menyimpang dari norma sosial masyarakat.

Ekstremisme Kekerasan

Tindakan mendukung, mempromosikan dan melakukan aksi-aksi kekerasan sebagai jalan untuk mencapai tujuan politik, agama, ras, suku, ideologi dst. Lebih lanjut, perilaku ekstremisme kekerasan ditandai dengan tindakan kekerasan terorganisir melalui pelatihan dan persiapan yang matang, dan menggunakan kekerasan bahkan jika harus mengorbankan masyarakat sipil.

Radikalisme dan ekstremisme adalah konsep yang sering disalahgunakan atau disalahartikan. Kedua istilah ini tidak memiliki batas yang jelas antara satu dengan yang lain dan secara ideologi politik dan praktik di lapangannya tidak jelas. Meskipun sebagian negara tidak memiliki definisi hukum tentang ekstrimisme atau radikalisme, namun ada banyak program pemerintah yang berhubungan dengan Pencegahan Ekstremisme Kekerasan (PE) dan Deradikalisasi karena keduanya dianggap berpotensi beralih ke bentuk kekerasan politik tertentu seperti terorisme. Untuk itu, Bötticher membedakan antara radikalisme dan ekstremisme sebagai berikut:

Radikalisme	Ekstremisme
<ul style="list-style-type: none">• Gerakan radikal cenderung menggunakan kekerasan politik secara pragmatis dan pada objek tertentu/spesifik.• Radikalis memandang masa depan yang cerah bagi semua orang adalah sesuatu yang harus dicapai• Radikalisme memiliki aspek emansipatoris dan bukan anti demokrasi.	<ul style="list-style-type: none">• Gerakan Ekstremis memandang kekerasan terhadap lawan adalah aksi yang legal dan cenderung menggunakan kekerasan secara massif sebagai bagian dari ideologi mereka• Ekstremis memiliki pandangan palingenetik atau ingin mengembalikan kejayaan masa lalu dengan “melahirkan kembali bangsa unggul”• Secara natural, ekstremisme anti demokrasi, berusaha untuk menghapuskan demokrasi konstitusional dan aturan hukum

Radikalisme	Ekstremisme
<ul style="list-style-type: none"> • Radikalisme tidak menentang persamaan HAM. Secara historis, radikal progresif memperjuangkan dan memperluas HAM kepada yang kurang mampu • Radikalis menjalankan aksi yang sangat berbeda dalam hal kelangsungan <i>status quo</i>, namun tidak berusaha untuk menutup masyarakat terbuka atau mengacaukan keberagaman masyarakat seperti yang dilakukan oleh ekstremis • Radikalisme sebagai oposisi yang melawan keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ekstremisme secara terbuka menentang HAM dan lembaga-lembaga yang memperjuangkan HAM • Ekstremisme anti terhadap pemikiran terbuka dan ekstrem baik dalam hal tujuan dan cara yang mereka pilih untuk mencapainya • Ekstremis tidak hanya melawan keamanan, namun juga terhadap semua yang tidak mau menerima dogma ekstrem mereka dalam mentransformasi masyarakat

Tabel 1. Perbedaan radikalisme dan ekstremisme

2. Radikalisasi Menuju Ekstremisme Kekerasan

a. Faktor penarik, faktor pendorong dan faktor pencegah

Wana Institute menyebutkan bahwa Individu terdorong untuk bergabung menjadi anggota kelompok ekstremisme kekerasan karena adanya faktor penarik, faktor pendorong⁷ dan faktor kerentanan individu. **Faktor ‘penarik’** adalah faktor yang membuat kelompok dan ideologi ekstremisme kekerasan memikat. **Faktor ‘pendorong’** merupakan hal-hal di lingkungan yang mendukung berkembangnya paham ekstremis kekerasan, **‘faktor kerentanan individu’** adalah faktor internal individu yang mendukung berkembangannya paham ekstremisme kekerasan, sementara **‘faktor pencegah’** adalah faktor internal ataupun eksternal yang dapat mencegah seseorang dari proses radikalisasi. Berikut gambaran proses faktor penarik dan pendorong untuk paham ekstremisme kekerasan di level individu dan kelompok (tabel 2).

⁷ Wana Institute .(2018). Reconceptualizing the drivers of violence extremism: an agenda for child and youth resilience : Wana Institute

Level Komunitas/ Kelompok

Faktor Penarik

Idealisme terdistorsi oleh kelompok ekstremisme kekerasan, seperti:

- Perbaikan Sosial-Ekonomi
- Mengembalikan kejayaan, dll

Faktor Pendorong

- Kondisi sosial ekonomi yang timpang/krisis
- Kurangnya akses Pendidikan
- Marjinalisasi etnis/kelompok/agama
- Terbatasnya akses partisipasi dalam kebijakan publik

Faktor Pencegah

Forum publik untuk berdiskusi
Pendekatan partisipatif dalam resolusi konflik
Mekanisme rekonsiliasi
Adanya sistem deteksi dan respon dini

Level Individu

Faktor Penarik

- Mendapat kebermaknaan diri dalam kelompok ekstremisme kekerasan
- Adanya insentif sosial-ekonomi yang diberikan oleh ekstremisme kekerasan
- Janji masuk surga pasca kematian
- Berpetualang dan melakukan hal baru

Faktor Kerentanan Individu

- Persepsi ketidakadilan
- Keduakaan karena kehilangan orang terdekat
- Kerabat terlibat aksi ekstremisme kekerasan
- Pandangan “aku vs mereka” yang kaku
- Kurangnya pengalaman keberagaman
- Terpapar narasi ekstremisme kekerasan di lingkungan daring/luring
- Cenderung mudah untuk menerima informasi tanpa dikritisi terlebih dulu

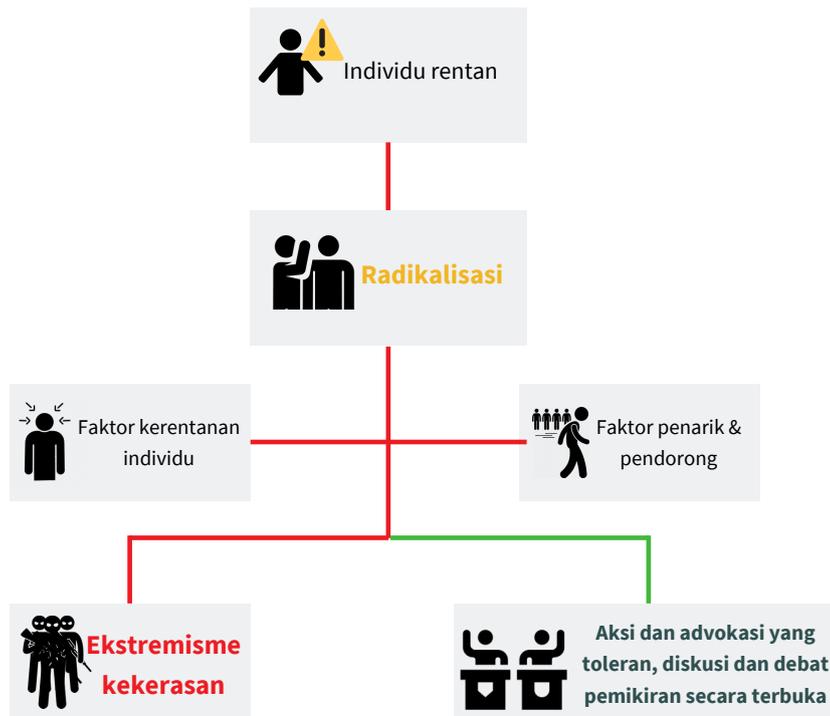
Faktor Pencegah

Literasi sosial-ekonomi
Kecerdasan mengolah informasi
Penghargaan terhadap orang lain (toleransi)
Kebiasaan tolong menolong (prososial)
Hubungan yang erat terhadap keluarga dan lingkungan
Pengalaman keberagaman (Empati)

Tabel 2. Faktor Penarik dan Pendorong Radikalisasi dimodifikasi dari Hedayah (2019)

Selain level individu dan kelompok, McCauley and Moskaleiko menambahkan level massa sebagai target radikalisis melalui penyebaran informasi dan propaganda paham ekstremisme.⁸

b. Tahap dalam radikalisis



Gambar 1. Tahap dalam radikalisis

Radikalisis dalam beberapa literatur dianggap sebagai proses seseorang atau kelompok mengadopsi keyakinan, emosi dan perilaku ekstremis. Proses ini dapat mengarahkan individu atau kelompok untuk menjadi radikal yang progresif (berkemajuan) atau radikal bahkan ekstremis yang menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan.

Meskipun begitu, tidak selamanya perubahan perilaku dan keyakinan individu bisa berjalan beriringan, dimana individu boleh jadi memiliki pandangan ekstrem namun tidak tergabung dalam kelompok dan gerakan ekstremis, atau-

⁸ Moskaleiko, S., & McCauley, C. (2011). The psychology of lone-wolf terrorism. *Counselling psychology quarterly*, 24(2), 115-126.

bahkan melakukan aksi kekerasan⁹ . Secara umum, analisis ilmiah tentang bagaimana individu atau kelompok terpapar dan menjadi anggota dalam kelompok ekstremisme kekerasan ditunjukkan dalam tiga fase, yaitu alienasi atau perasaan terasing dari lingkungan sosial disertai dengan usaha untuk mencari identitas baru, selanjutnya radikalisasi dan kemudian transisi dari radikalisasi ke pelaksanaan kekerasan secara masif. Dalam hal pencegahan ekstremisme kekerasan, perlu dipahami karakteristik dan faktor pada tiap fasenya.¹⁰

Alienasi: Perasaan terasing dapat muncul dari pengucilan, penghinaan, penganiayaan, dan prasangka terhadap individu atau kelompok tertentu oleh suatu komunitas, negara dan institusinya atau masyarakat luas. Alienasi juga bisa muncul karena ketidakadilan dalam hal mengakses pelayanan dasar dan aturan hukum oleh kelompok minoritas tertentu. Pada fase ini, karakteristik hubungan antara individu atau kelompok terhadap keluarga, masyarakat dan negara seperti menarik diri, tidak taat aturan, mengeluh dan menurunkan partisipasinya dalam hal politik dan ekonomi.

Radikalisasi: Ketika frustrasi terhadap keadaan semakin meningkat, individu dan kelompok mulai mencari organisasi, ideologi atau paham yang mampu menjawab frustrasinya atau menjerumuskan mereka untuk menyalahkan aktor eksternal. Dalam situasi seperti itu, radikalisasi dapat muncul melalui celah tidak memadainya sistem untuk memediasi dialog dan komunikasi antarkelompok yang lebih luas, tidak adanya toleransi dan keterbukaan dalam lingkungan sosial politik dari komunitas tertentu, ketidakmampuan untuk mengenali provokator dan agen radikalisasi dan tidak adanya alternatif yang layak dalam hal pemberdayaan baik bagi individu ataupun ruang publik. Dalam proses ini, institusi keluarga dan komunitas memegang peranan penting. Agen radikalisasi fokus dan tertarik pada kelompok yang rentan terasing di masyarakat dan memanipulasi perasaan frustrasi dan kemarahan mereka. Individu yang terpapar ideologi radikal jika ditangani dengan tujuan untuk -

⁹ Demant, F., Slooman, M., Buijs, F., and Tillie, J. (2008). Decline and disengagement: An analysis of processes of de-radicalisation. Amsterdam: Institute for Migration and Ethnic Studies (IMES).

¹⁰ UNDP .(2016). Preventing violence extremism through promoting inclusive development, tolerance and respect for diversity: A development respond to addressing radicalization and violent extremism

sistem sebagai bentuk ekspresi atau penyaluran, maka akan menjadi aset bagi masyarakat dan menjadi agen perubahan ke arah yang lebih baik. Sementara, ekstremisme kekerasan kemudian muncul ketika perilakunya diarahkan pada kekerasan dengan anggapan sebagai bentuk ekspresi atau penyaluran.

Kepatuhan terhadap kekerasan: fase terakhir yang memisahkan radikalisme dengan ekstremisme kekerasan adalah radikalisme memilih jalur advokasi yang damai, diskusi dan debat pemikiran secara terbuka untuk mencapai tujuannya, sementara ekstremisme kekerasan memilih jalur kekerasan untuk memperlihatkan pandangan mereka terhadap dunia kepada masyarakat luas. Ritual-ritual kekerasan seperti yang dilakukan menjadi sarana untuk mempromosikan dan memberikan inspirasi kolektif. Fase ini menggambarkan kegagalan sistem deteksi dan respon dini sehubungan dengan munculnya tanda-tanda menuju ekstremisme kekerasan.

3. Media Penyebaran

Menurut laporan CSRC UIN Jakarta menyebutkan bahwa ada tiga pola penyebaran narasi ekstremisme kekerasan.¹¹

- Pertama, media (komunikasi) yang mencakup media cetak, elektronik dan daring, buletin, majalah, selebaran dan blog.
- Kedua, hubungan interpersonal yang dapat berupa hubungan keluarga, guru, teman/sahabat.
- Ketiga, ruang atau *setting* sosial yang meliputi kegiatan pengajian, kajian, *halaqah*, les, seminar dll.

Zeiger lebih menyoroti media *online* sebagai perangkat komunikasi dalam penyebaran narasi dan propaganda ekstremisme kekerasan¹². APJII pada tahun 2018 mencatat 143,26 juta jiwa masyarakat Indonesia menjadi pengguna aktif -

¹¹ Abubakar, I., Pranawati, R., Hemay, I., Djafar, A.M., Nuriz, M.A.L, Simun, J., Syarif, U.A. (2018). Pesan Damai Pesantren: Modul Kontra Narasi). Jakarta: CSRC UIN & KAS

¹² Zeiger S. (2019). Digital and media literacy. Regional capacity building workshop: Prevention of violence extremism through education. Bangkok: UNDP

internet dan di antaranya adalah remaja usia 15-19 tahun¹³. Lebih lanjut Zeiger mengungkapkan beberapa tantangan dan masalah dalam menghadapi propaganda dan narasi ekstremisme kekerasan melalui internet:

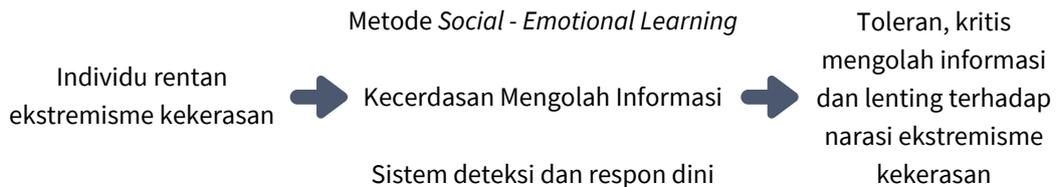
- Internet dapat dengan mudah disalahgunakan oleh individu atau kelompok jahat.
- Siswa atau siswi dapat menyalahartikan pesan dari media daring ataupun luring. Menentukan sesuatu adalah fakta atau bukan menjadi sulit tanpa ada sumber dari luar.
- Beberapa bentuk konten yang berpotensi merusak adalah:
 - Ujaran kebencian, berusaha memecah belah masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan, gender, etnis, agama, pilihan politik dll.
 - Propaganda, berusaha meyakinkan orang lain terhadap sesuatu (pendapat, metode, barang atau jasa) dengan lebih menyoroti satu aspek dari informasi yang disampaikan.

¹³ lihat lebih lanjut di <https://apjii.or.id/content/read/104/398/BULETIN-APJII-EDISI-33---Januari-2019>

B. PENTINGNYA MERESPON EKSTREMISME KEKERASAN

1. Skema Hubungan Antarvariabel

Ekstremisme kekerasan adalah fenomena global yang telah menelan banyak korban jiwa yang tidak bersalah dari berbagai kepercayaan, ras ataupun negara. Ekstremisme kekerasan merupakan merupakan hasil dari keadaan historis, politik, ekonomi, dan sosial, termasuk dampak dari politik regional dan global. Akar penyebab ekstremisme kekerasan cukup kompleks, beragam, saling terkait satu sama lain sebagaimana yang telah dijelaskan dengan sebelumnya. Berikut merupakan skema yang menggambarkan hubungan antarvariabel dalam merespon ekstremisme kekerasan:



Gambar 3. Skema hubungan antarvariabel

Hubungan antara intoleransi, radikalisasi dan ekstremisme kekerasan dapat dilihat dari rangkaian proses aktivitasnya. Untuk konteks Indonesia, sejauh ini dapat dilihat bahwa konflik-konflik paham keagamaan memiliki pola yang mirip, yaitu diawali dari penyebaran kebencian, dilanjutkan tindakan penyesatan, dan diikuti kemudian oleh kekerasan massa atau kriminalisasi korban oleh aparat penegak hukum¹⁴. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya untuk menangkal kekerasan dan konflik berbasis agama mesti diawali dengan upaya mencegah penyebaran kebencian. Oleh karena itu, untuk memastikan efektivitas pencegahan kekerasan -

¹⁴ Azhari, M.S., & Ghozali, M.F.

berbasis ideologi apa pun, termasuk agama, harus dimulai dari intervensi yang mendorong sikap toleransi terhadap perbedaan serta menghentikan arus kampanye kebencian. Bagaimana cara mendorong toleransi dan menghentikan kebencian?

2. Pendekatan *Social-Emotional Learning*

Ada sejumlah cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan toleransi dan respek terhadap orang lain. Beberapa strategi yang paling sering digunakan adalah mendorong pengalaman berinteraksi dengan orang lain yang berbeda (hipotesis kontak). Perspektif ini melihat bahwa interaksi dengan orang yang berbeda akan dapat mengurangi prasangka terhadap orang lain. Namun, proses kontak baru akan efektif bekerja dalam beberapa kondisi, terutama kesiapan manusia untuk bekerja sama dengan orang lain. **Social - Emotional Learning** (disingkat, SEL) adalah proses belajar dimana anak dan orang dewasa secara efektif dapat memanfaatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mengelola emosi, mencapai tujuan-tujuan positif, berempati pada orang lain, mempertahankan hubungan yang positif dengan orang lain, serta bertanggung jawab atas keputusan yang dia ambil.¹⁵

Terdapat tiga fitur utama dalam SEL yang relevan dalam upaya mendorong toleransi dan respek terhadap orang lain:

- **Identitas diri:** Terbentuk dari komunitas, teman sebaya, pemerintahan, melalui proses persepsi dan regulasi diri.
- **Keterkaitan dengan orang lain:** Menerima perbedaan pendapat sebagai hal yang mendasar melalui peningkatan kepekaan sosial dan keterampilan dalam berinteraksi dengan orang lain.
- **Pengambilan keputusan dan perilaku yang bertanggung jawab:** Memastikan bahwa keputusan-keputusan dan tingkah laku kita tidak membahayakan orang lain.

Dalam lingkungan pendidikan seperti sekolah/madrasah, SEL dapat secara alamiah dilakukan melalui kegiatan belajar mengajar karena pada dasarnya SEL memang proses belajar.

¹⁵ Lihat lebih jauh tentang social emotional learning di <https://casel.org/what-is-sel/>

3. Pendekatan Early Warning and Early Respon System (EWERS) di Sekolah/Madrasah

Ekstremisme kekerasan adalah fenomena global yang telah menelan banyak korban jiwa yang tidak bersalah dari berbagai kepercayaan, ras ataupun negara. Ekstremisme kekerasan merupakan hasil dari keadaan historis, politik, ekonomi, dan sosial, termasuk dampak dari politik regional dan global. Akar penyebab ekstremisme kekerasan cukup kompleks, beragam, saling terkait satu sama lain sebagaimana yang telah dijelaskan dengan sebelumnya. Meskipun begitu, sebagian besar negara dan beberapa lembaga nonpemerintah memiliki program yang berhubungan dengan pencegahan ekstremisme kekerasan dan deradikalisasi.

Penguatan guru dan siswa sebagai individu dan sekolah/madrasah sebagai institusi adalah prasyarat penting bagi tercapainya tujuan program pencegahan ekstremisme kekerasan dan radikalisme pada siswa. Upaya ini juga sejalan dengan upaya memberdayakan lingkungan pendidikan dan moderasi beragama. Program penguatan komunitas sekolah/madrasah sebagai bagian dari program pencegahan ekstremisme kekerasan bukan saja dilakukan di Indonesia. Sejumlah negara seperti Kosovo, Uganda, Abu Dhabi, Swedia, Inggris dan sebagainya, sudah menerapkan program-program semacam ini. Hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah sebagai berikut:

- Program intervensi Pencegahan Ekstremisme Kekerasan (selanjutnya disebut PE) difokuskan pada faktor-faktor yang selama ini telah ditemukan menjadi prediktor perilaku ekstremisme kekerasan, yaitu aspek identitas dan religiusitas. Metodenya non-militeristik yang didesain sedemikian rupa untuk dapat mengantisipasi sebelum perilaku ekstremisme kekerasan tersebut terwujud dalam perilaku. Kekuatan program terletak pada ketajaman mengidentifikasi tanda-tanda awal kerentanan atas ekstremisme. Dikarenakan terdapat sejumlah faktor yang bisa dikatakan menjadi pemicu perilaku ekstremisme kekerasan ini, maka tantangan keberhasilan program ini adalah pada kesuksesan melakukan identifikasi awal dan merespon hasil identifikasi tersebut dan menindaklanjutinya dalam program pencegahan.

- Hingga kini sudah lebih dari 50 negara di dunia yang mengadopsi program PE.¹⁶ PE adalah solusi yang efektif untuk melengkapi kebijakan antiterorisme. Fokus kegiatannya ada pada upaya edukasi untuk mendorong kemampuan berpikir kritis dan meningkatkan literasi digital dan religiusitas, serta berbagai program di komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan untuk berinteraksi dengan kelompok dan identitas yang berbeda. Dengan mengutamakan prevensi diharapkan keberhasilan program ini dapat dirasakan dalam jangka panjang dan menyeluruh.

¹⁶ Stephens, W., Sieckelinck, S., & Boutellier, H. (2019). Preventing Violent Extremism : A Review of the Literature. *Studies in Conflict & Terrorism*, 0(0), 1–16. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2018.1543144>

C. MENGENALI TANDA-TANDA RENTAN EKSTREMISME KEKERASAN DI SEKOLAH/MADRASAH

Berikut adalah masukan-masukan teknis jika sekolah atau guru menemukan tanda-tanda kerentanan ekstremisme kekerasan pada siswa mereka secara lebih detail. Untuk memudahkan penggunaan panduan masing-masing tanda akan dimasukkan ke dalam tiga indikator yaitu: intensi melakukan kekerasan, hubungan sosial yang makin eksklusif, dan tindakan melakukan kekerasan.



Indikator terkait intensi

Guru perlu mewaspada ketika peserta didik mulai menggunakan retorika kekerasan atau kebencian ketika menanggapi suatu peristiwa atau masalah sosial. Penggunaan retorika kekerasan dan kebencian ini biasanya disertai juga dengan penggunaan teori konspirasi tertentu. Ide dasar dari teori konspirasi adalah kepercayaan bahwa: “terdapat kelompok tertentu di luar sana yang berusaha menghancurkan kelompok saya”. Kecurigaan yang tak mendasar seperti ini tentu menjadi ancaman terhadap kebersamaan. Guru harus mencoba memahami mengapa siswanya mengadopsi cara berpikir seperti itu. Selanjutnya guru juga bisa mengajak siswa untuk melakukan eksperimen pikiran bagaimana seandainya ia yang berada pada pihak yang akan mendapatkan kekerasan, apakah ia bisa menerima mendapatkan kekerasan padahal ia tidak memilih untuk masuk ke dalam suatu kelompok tertentu, apakah adil jika ia mendapatkan suatu kekerasan atau kebencian karena ia adalah anggota suatu kelompok tertentu.



Indikator terkait hubungan sosial

Guru juga harus mulai waspada ketika siswanya diketahui memiliki hubungan yang renggang dengan keluarga, kontak yang terbatas dengan kelompok lain, terlibat dalam kelompok pertemanan yang terisolasi, atau mendapatkan pengaruh kelompok sosial yang negatif. Banyak kasus-kasus ekstremisme kekerasan yang dimulai dari menjauhnya anak dari keluarganya karena merasa apa yang ia pikirkan dan rasakan tidak didukung. Namun, pada beberapa kasus keterlibatan siswa dengan terorisme justru berasal dari keluarga. Sekolah dan guru dapat menjadi pihak yang membantu anak sehingga tidak membuat ia berpaling mencari penerimaan dan kenyamanan di kelompok atau gerakan intoleran dan ekstrem.

Sekolah dan guru memberikan perhatian lebih kepada siswa-siswa yang menutup diri dan hanya bergaul dalam kelompok yang eksklusif. Sekolah atau guru bisa membangun keakraban di antara siswa dengan meminta mereka mengerjakan tugas bersama tetapi dengan anggota kelompok yang dipilih oleh guru sehingga setiap anak memiliki kesempatan mengenal satu sama lain.

Guru juga bisa melakukan pembicaraan personal dengan anak-anak yang dianggap sulit bergaul dengan yang lain. Pada pertemuan tersebut guru bisa menanyakan hal apa yang membuat siswa menarik diri dari siswa lain dan mendiskusikan hal apa yang bisa dilakukan agar lingkaran pergaulan siswa tersebut menjadi lebih besar. Dengan membangun percakapan yang bersifat setara, guru menunjukkan bahwa mereka memang menghargai dan memperhatikan tantangan-tantangan pribadi yang dihadapi oleh para siswa mereka yang memang sedang bergelut dengan isu-isu identitas dan makna.



**Indikator terkait
Perilaku**

Indikator terakhir terkait dengan kompetensi melakukan ekstremisme kekerasan yaitu yang dapat dilihat dari adanya perilaku berisiko tinggi seperti penggunaan obat-obatan terlarang, perubahan mendadak dalam perilaku agama yang makin ekstrem, mengikuti pelatihan paramiliter, mempelajari keahlian-keahlian yang relevan dengan tindak ekstremisme kekerasan seperti kimia (khususnya pembuatan bom), hingga bepergian ke luar negeri, terutama dari daerah konflik. Menanggapi kondisi seperti ini dibutuhkan kemampuan bertukar pikiran antara guru dan peserta didik dalam situasi yang dirasa aman. Hal ini penting karena indikator-indikator ini sifatnya lebih sensitif dibanding dua indikator sebelumnya.

"Jika dalam proses deteksi ditemukan indikator di lebih dari satu jenis resiko pada seorang siswa yaitu pada level Risiko Waspada-Mengkhawatirkan, Waspada-Bahaya atau Mengkhawatirkan-Bahaya, maka sangat disarankan untuk ditindaklanjuti ke tahap rujukan atau menghubungi pihak yang berwenang jika dipandang perlu."

Tanda-tanda rentan ekstremisme kekerasan

Indikator	Waspada	Mengkhawatirkan	Bahaya
 Intensi	Enggan mendengarkan ceramah di luar kelompoknya walau pengetahuan tentang agama mereka masih terbatas	Sering menunjukkan paham mesianistik, atau kepercayaan akan kehadiran seorang figur juru selamat	Menganggap negara sebagai tagut dan boleh diperangi menggunakan kekerasan
	Menunjukkan keinginan untuk membentuk komunitas baru berbasis ideologinya	Sering menunjukkan paham millenarianisme, atau ide bahwa ada zaman yang ideal yang akan datang	Menganggap orang selain kelompoknya halal darahnya (boleh diperangi).
 hubungan sosial	Memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dengan kelompoknya dibanding dengan keluarga	Memiliki hubungan dengan kelompok yang berideologi ekstremisme kekerasan	Memutus hubungan dengan teman atau lingkungan sosial, atau memutus hubungan dengan keluarga
 Perilaku	Menggunakan retorika kebencian atau merendahkan kelompok lain yang berbeda, biasanya menggunakan teori konspirasi	Menyerang kepercayaan atau keyakinan orang lain	Menggunakan retorika kematian (martir, syahid, kematian mulia) dalam rangka perjuangannya
	Perubahan mendadak dalam perilaku agama	Menolak kedaulatan pemerintahan Indonesia karena tidak sesuai dengan agama	Terlibat di dalam kelompok ekstremis
	Suka melabel mereka yang tidak sepaham sebagai sesat	Menolak untuk menghormati simbol-simbol negara	Mengikuti pelatihan paramiliter

Indikator	Waspada	Mengkhawatirkan	Bahaya
	Kepergian ke atau kedatangan dari luar negeri, utamanya daerah konflik	Mengonsumsi informasi tentang kelompok-kelompok ekstremisme kekerasan	Pernah terlibat di pertempuran bersenjata di daerah konflik
	Menarik diri dari lingkungan yang berbeda paham	Kontak yang terbatas dengan kelompok lain selain kelompok mereka sendiri	Kesanggupan menyerahkan sejumlah uang kepada kelompok kendati dilakukan dengan cara tidak benar bahkan kriminal
	Mengikuti atau menyelenggarakan kajian-kajian agama yang dilakukan secara tertutup	Penggunaan retorika kekerasan sebagai solusi masalah sosial	Mengunggah atau menyebarkan propaganda promosi paham ekstrem dan kekerasan, termasuk ujaran kebencian dan hoaks

" Sebagai orang tua siswa di sekolah/madrasah, Anda tentulah pihak yang paling mengetahui siswa Anda. Jika Anda merasa bahwa indikasi-indikasi yang diberikan di panduan ini tidak cukup relevan digunakan, percayalah pada kemampuan profesional Anda, atau minta bantuan dari kolega yang lebih berpengalaman. Sangat disarankan untuk menggunakan PROTOKOL RANGKUL."

D. STRATEGI PENCEGAHAN DAN MERESPON TANDA-TANDA RENTAN EKSTREMISME KEKERASAN DI SEKOLAH/MADRASAH

Komunitas sekolah/madrasah mayoritas terdiri atas dua elemen besar yaitu siswa dan guru. Mempertimbangkan fakta ini, strategi merespon tanda-tanda kerentanan terpapar ekstremisme kekerasan di sekolah/madrasah tidak lepas dari pelibatan kedua elemen tersebut.



Kurikulum dan Pengajaran

Secara alamiah guru berinteraksi setiap hari dengan para siswa. Dalam proses ini, guru sangat mungkin menjadi pihak pertama yang mendapati adanya perubahan dalam tampilan, dan tingkah laku para siswanya. Oleh karena itu, guru dapat menjadi filter deteksi pertama dalam menakar kerentanan para siswa atas paparan radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Lebih jauh, kita pahami bahwa indikator kerentanan atas paparan ideologi seperti ekstremisme kekerasan seringkali bukan sesuatu yang termanifestasi secara kasat mata lewat tampilan fisik, melainkan lewat cara berpikir. Untuk itu, peran guru di kelas juga dapat menjadi media untuk mendeteksi perubahan cara berpikir siswa. Kegiatan belajar yang merangsang siswa mengeluarkan pendapat, seperti diskusi topik pro-kontra, dapat menjadi pilihan yang efektif. Di sisi lain melalui media tersebut, guru juga menyampaikan pendidikan toleransi, demokratis, tidak mudah menghakimi orang lain yang berbeda, empati dll.

Selanjutnya, guru dapat lebih jauh menindaklanjuti dugaan atas kerentanan tersebut dengan cara mencari informasi lebih jauh atas dugaan kerentanan atau keterpaparan itu langsung ke siswa yang bersangkutan atau pihak lain yang relevan seperti keluarga. Guru dalam hal ini dapat melakukan upaya lebih jauh untuk memastikan apakah siswa yang bersangkutan memang terpapar ekstremisme misalnya dengan mengajak diskusi atau bentuk-bentuk konseling lainnya. Pada tahap¹⁷ ini juga strategi RANGKUL sekolah/madrasah juga dapat mulai dijalankan.

¹⁷ Lihat lebih lanjut Pedoman RANGKUL Guru



Kegiatan Kesiswaan

Siswa adalah bagian utama dari sekolah/madrasah, sekaligus juga merupakan sasaran dari pendidikan sekolah/madrasah itu sendiri. Upaya untuk melibatkan siswa dalam strategi deteksi dan respon dini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena tentunya tujuan dari program ini adalah mewujudkan sekolah/madrasah yang lebih aman dan nyaman bagi siswanya. Strategi deteksi dan respon dini ini tidak ditujukan untuk membuat siswa saling menjadi detektif satu sama lain. Oleh karena itu, berbeda dengan guru, penekanan pelibatan pada siswa lebih difokuskan pada peningkatan keterampilan berempati dan menghargai sesama melalui kegiatan-kegiatan intrakurikuler, kokurikuler ataupun ekstrakurikuler. Fokus kegiatan siswa adalah pada peningkatan keterampilan merespon perbedaan dengan baik. Diharapkan dari sini, siswa juga mampu menjadi dukungan sosial yang positif bagi rekannya yang rentan terpapar. Keterampilan dan pemahaman akan sistem dan deteksi dini di sekolah/madrasah dapat diajarkan pada siswa sebagai bagian dari program pencegahan.



Sistem Deteksi dan Respon Dini

Sistem deteksi dan respon dini merupakan sistem yang dibentuk secara partisipatoris dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam sebuah komunitas, atau dalam hal ini stakeholder sekolah/madrasah. Sistem ini bertugas untuk mendeteksi tanda-tanda kerentanan individu terhadap ekstremisme kekerasan berdasarkan indikator-indikator intensi, perilaku dan hubungan sosial yang telah dibuat, serta merespon tanda-tanda tersebut berdasarkan protokol yang jelas dan sistematis. Indikator tanda-tanda kerentanan dibuat berdasarkan hasil penelitian terhadap perilaku ekstremisme kekerasan dan memungkinkan ada pengembangan indikator dari yang sudah ada mengikuti pola perkembangan dan konteks ekstremisme kekerasan dari waktu ke waktu. Sistem deteksi dan respon dini di sekolah/madrasah adalah satu kesatuan yang tidak terpisah dengan strategi pencegahan yang dilakukan oleh guru melalui pengajaran dan oleh siswa selaku agen toleransi kepada teman sebaya dan lingkungan. Salah satu strategi deteksi dan respon dini yang disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah/madrasah adalah RANGKUL yang akan dijabarkan lebih lanjut pada bab berikutnya.

E. RANGKUL: SISTEM DETEKSI DAN RESPON DINI

1. Mengenali RANGKUL Sebagai Sistem

Secara harfiah, rangkul dapat diartikan sebagai “mendekap” atau “memeluk”. Namun, secara filosofis, kata rangkul dalam program ini mencerminkan sebuah itikad untuk mendekatkan diri dan memberi dukungan bagi komunitas sekolah/madrasah yang rentan terhadap ekstremisme kekerasan agar terhindar dari radikalisme menuju ekstremisme kekerasan. Program ini sejalan dengan:

- Agenda Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) yang saat ini sedang dalam proses penyusunan Peraturan Presiden.
- UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 3: *Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.*
- Peraturan Presiden No 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), terutama Pasal 3: *PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.*
- Dalam pelaksanaannya, khusus untuk sekolah/madrasah, program PE ini dapat dilakukan sejalan dengan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada Satuan Pendidikan Formal.

Program ini adalah program yang didesain untuk membantu seluruh stakeholder sekolah/madrasah, mulai dari guru, siswa dan pejabat sekolah/madrasah dalam melakukan upaya deteksi dan tanggap dini atas tanda-tanda rentan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme pada seluruh komunitas sekolah dan -

madrasah, khususnya untuk siswa. Sekolah/madrasah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tumbuh kembangnya kemampuan kognitif dan perilaku demokratis; sekolah/madrasah juga menjadi tempat dimana tanda-tanda awal radikalisme dapat terlihat dan ditangani. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam kelancaran program ini.

2. Prinsip-Prinsip RANGKUL

Prinsip RANGKUL disusun berdasarkan empat prinsip:

- **Dialog**

Prinsip pertama dalam melakukan program PE di lingkungan sekolah atau madrasah adalah berdialog dengan siswa yang sudah menunjukkan sinyal-sinyal akan, atau sudah tertarik atau terlibat dalam ide-ide atau kelompok ekstremisme kekerasan. Dialog ini berguna untuk menggali motif dibalik perilaku tersebut. Sinyal-sinyal tersebut dapat terbaca melalui perkataan, tampilan luar dan perilaku siswa. Dari bukti-bukti yang ada selama ini, tidak ada satupun dari masing-masing atau kombinasi dari ketiga karakteristik tersebut yang bisa menjadi indikator pasti perilaku ekstremisme. Guru dan teman sebaya siswa memiliki peran penting dimana secara sekuensial ataupun paralel kedua pihak ini mengidentifikasi dan menggali motif siswa apakah sinyal-sinyal tersebut merupakan bentuk protes atas suatu situasi yang dianggap ketidakadilan, protes pada orang tua, guru atau masyarakat, atau negara? Atau ini adalah bentuk ideologi tertentu yang bisa merupakan ekspresi atas klaim kebenaran tertentu yang menyalahkan pihak di luar kelompoknya, dst. Dialog seperti ini pada hakikatnya adalah dialog wajar yang biasa dilakukan oleh guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Bukan meletakkan posisi guru dan teman sebaya siswa sebagai 'mata-mata', namun guru mencoba memahami perkembangan pemikiran dan psikologis muridnya, sebagaimana sejatinya relasi antara guru dan siswa, di sisi lain teman sebaya siswa berusaha menjadi teman yang baik dengan menunjukkan rasa kepedulian. Hal ini penting untuk menjaga rasa percaya yang dibutuhkan antara siswa dan guru agar mendapatkan kualitas komunikasi.

- o **Praktik demokratis**

Prinsip kedua adalah mempelajari demokrasi dengan cara berpraktik demokrasi, bukan hanya mempelajari konsep, bukan hanya membahas konstitusi apalagi menghapuskan sila-sila Pancasila. Berpraktik demokrasi berarti membiasakan diri mengelola konflik, kontroversi dan menangani perbedaan. Siswa diajak untuk mempelajari bahwa di Indonesia, perbedaan adalah fakta. Oleh karena itu, kemampuan dasar yang harus dimiliki adalah menerima perbedaan pendapat, agama, suku, dan lain-lain, lalu menerima konsekuensi adanya perbedaan termasuk konflik kepentingan, dan berkompromi sebagai solusi atas konflik tersebut. Kemampuan-kemampuan ini dapat disisipkan dalam kegiatan belajar mengajar di ruang kelas, tanpa harus mengadakan kegiatan khusus.

- o ***Do no harm***

Prinsip ketiga adalah melaksanakan pencegahan ekstremisme kekerasan tanpa harus menggunakan cara-cara negatif yang dapat memunculkan bahaya bagi siswa, guru, sekolah/madrasah, orang tua dan lingkungan. Sistem PE di sekolah dan madrasah harus didasarkan pada netralitas dan terlepas dari prasangka tertentu terhadap perilaku yang diduga mengarah pada ekstremisme kekerasan.

- o ***Menghargai hak anak sesuai Undang-Undang***

Prinsip keempat menekankan sistem PE yang menjamin tumbuh, kembang dan partisipasi siswa sesuai dengan potensinya masing-masing dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan di sekolah/madrasah serta memastikan pemenuhan hak siswa atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi kepentingan terbaik siswa sebagai pihak yang paling rentan terhadap radikalisasi menuju ekstremisme kekerasan.

3. Pelaksana Program RANGKUL

Kunci utama lancarnya program RANGKUL adalah keterlibatan dari seluruh pihak, mulai dari pejabat sekolah/madrasah, guru, siswa, komite sekolah/madrasah, tokoh masyarakat dan agama, tenaga profesional dan pemerintah. Pelaksana program RANGKUL adalah Komite RANGKUL, Komite Gabungan dan Jejaring Eksternal.

Komite RANGKUL

Komite RANGKUL adalah unit khusus dengan struktur dan mekanisme kelembagaan tingkat sekolah/madrasah sebagai pelaksana sistem deteksi dan respon dini tingkat sekolah/madrasah. Anggota Komite RANGKUL dipilih berdasarkan kompetensi serta tugas dan fungsinya di sekolah/madrasah. Untuk melaksanakan tugasnya, Komite RANGKUL harus memahami betul tata pelaksanaan sistem deteksi dan respon dini dalam RANGKUL ini. Sifat dan masa keanggotaan dapat diatur oleh sekolah/madrasah sehingga memungkinkan terjadi transfer pengetahuan dan keterampilan melaksanakan program RANGKUL ini oleh kalangan pengajar sekolah/madrasah secara berkelanjutan.

Tugas pokok dan fungsi

Tugas pokok Komite RANGKUL adalah menginisiasi, menjalankan, memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan dan pengembangan program RANGKUL di sekolah/madrasah

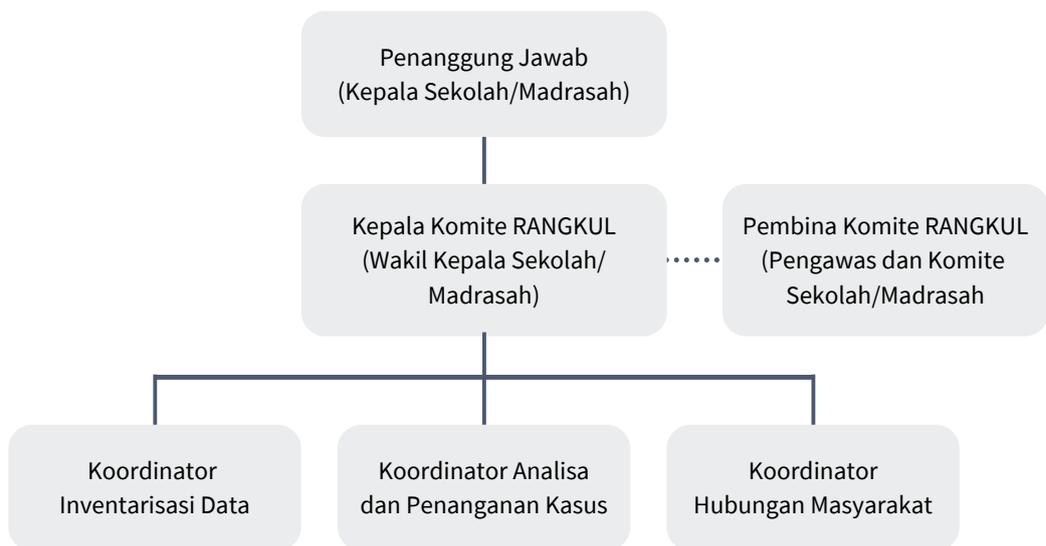
Dalam menjalankan tugasnya, Komite RANGKUL melaksanakan **fungsi**:

- Pencatatan dan inventarisasi setiap laporan dan dugaan kasus yang masuk ke Komite RANGKUL
- Melakukan prosedur uji sah yang baku dan terstandar terhadap kasus yang telah diinventarisir
- Pengelolaan risiko termasuk menjaga kerahasiaan data yang berhubungan dengan para siswa dan sivitas sekolah/madrasah yang berisiko dengan potensi terorisme
- Koordinasi secara berkala dengan Komite Gabungan dan Jejaring Eksternal

Struktur organisasi dan uraian tugas

Jumlah keseluruhan anggota Komite RANGKUL ini terdiri dari 4-5 orang dengan saran keanggotaan sebagai berikut:

- Wakil Kepala Sekolah/Madrasah (sebagai ketua unit)
- Guru BK
- Guru representasi ilmu sosial
- Guru representasi ilmu eksakta
- Guru representasi pendidikan karakter/agama



Gambar 4. Struktur organisasi Komite RANGKUL di sekolah/madrasah

Penanggung Jawab

Penanggung Jawab dijabat oleh Kepala masing-masing Sekolah/Madrasah yang bertugas memastikan Komite RANGKUL bekerja menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan protokol, sehingga RANGKUL sebagai sistem deteksi dan respon dini dapat berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Pembina

Pembina dijabat oleh Pengawas dan Komite Sekolah/Madrasah yang memiliki komitmen untuk pencegahan penyebaran ekstremisme kekerasan di sekolah/madrasah. Pembina berkewajiban mengayomi, memberi saran, masukan dan pembinaan terhadap Komite RANGKUL terkait deteksi dan respon dini tanda-tanda rentan ekstremisme kekerasan di sekolah/madrasah.

Kepala Komite RANGKUL

Kepala Komite RANGKUL bertugas membuat perencanaan, mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Komite RANGKUL secara keseluruhan, memastikan Komite RANGKUL bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota serta secara aktif membangun dan membina hubungan baik dengan stakeholder.

Koordinator Inventarisasi Data

Koordinator Inventarisasi Data bertugas untuk melakukan pencatatan, pendokumentasian dan inventarisasi data yang digali oleh anggota Komite RANGKUL atau berdasarkan laporan yang masuk dari komunitas sekolah/madrasah. Data yang masuk dapat berupa hasil observasi, wawancara ataupun temuan-temuan langsung di lapangan terkait intensi, perilaku dan relasi sosial individu yang diduga berpotensi rentan ekstremisme kekerasan. Data yang dikelola dalam bagian ini juga termasuk hasil analisis, pembahasan dan penanganan kasus di internal Komite RANGKUL serta hasil proses rujukan ke Komite Gabungan. Koordinator Inventarisasi Data senantiasa bekerja dengan prinsip kerahasiaan data.

Koordinator Analisa dan Penanganan Kasus

Koordinator Analisa dan Penanganan Kasus bertugas mengoordinasikan tim untuk menguji keabsahan data yang masuk, menganalisis dan membahas kasus yang terkonfirmasi keabsahannya. Bagian ini menjadi sangat krusial karena hasil dari pembahasan kasus ini yang menentukan penanganan seperti apa yang cocok bagi individu yang terkonfirmasi rentan terhadap ekstremisme kekerasan. Bagian ini harus benar-benar menjunjung prinsip penghargaan terhadap hak individu, empati, tidak menghakimi, demokratis, dan menjaga kerahasiaan data. Komite RANGKUL disiapkan untuk melakukan deteksi dan respon terhadap tanda-tanda rentan ekstremisme kekerasan dengan level “risiko standar” yaitu perilaku umum yang muncul di awal-awal periode inisiasi ekstremisme kekerasan.

Koordinator Hubungan Masyarakat

Koordinator Hubungan Masyarakat bertugas mengoordinasikan kegiatan Komite RANGKUL bersama guru pendidikan karakter/agama dalam hal sosialisasi dan pendidikan terhadap komunitas sekolah/madrasah terkait ekstremisme kekerasan, utamanya terhadap siswa sebagai pihak yang paling rentan terhadap narasi ekstremisme kekerasan. Selain itu, bagian ini juga bertugas untuk berkoordinasi secara langsung kepada Komite Gabungan dalam hal penanganan kasus kategori “merah” yang tidak dapat diselesaikan dalam lingkup sekolah/madrasah karena membutuhkan kompetensi khusus untuk mendapatkan asesmen dan intervensi lanjutan. Apabila dari hasil putusan -

Komite RANGKUL di sekolah/madrasah memutuskan bahwa dugaan perilaku rentan tersebut tidak bersumber dari masalah ideologi ekstremisme kekerasan, namun hal lain, maka dapat dirujuk ke pihak-pihak lain yang dalam protokol ini disebut sebagai Jejaring Eksternal.

Mekanisme Kerja

Langkah 1

Koordinator Hubungan Masyarakat mengoordinasikan anggota Komite RANGKUL bersama guru pendidikan karakter/agama untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan daya lenting (resiliensi) kepada seluruh komunitas sekolah/madrasah.

Langkah 2

Pelaporan kasus oleh guru, siswa ataupun komunitas sekolah/madrasah lainnya kemudian dicatat, didokumentasikan dan diinventarisasi oleh Koordinator Inventarisasi Data sesuai dengan prosedur dan prinsip kerahasiaan data.

Langkah 3

Atas laporan kasus yang masuk, Koordinator Analisa dan Penanganan Kasus menguji keabsahan data yang masuk, menganalisis dan membahas kasus yang terkonfirmasi keabsahannya. Pengujian dilakukan dengan mengonfirmasi pelapor, telapor ataupun sumber-sumber lain yang diperlukan. Untuk kasus yang terkonfirmasi keabsahannya, Koordinator Analisa dan Pembahasan Kasus memfasilitasi forum bersama anggota Komite RANGKUL untuk memutuskan rekomendasi penanganan kasus tersebut, apakah masih dapat ditangani sendiri oleh sekolah/madrasah atau dirujuk ke Komite Gabungan/Jejaring Eksternal.

Langkah 4

Untuk kasus yang masih bisa ditangani oleh sekolah/madrasah karena masih berada dalam tahap “risiko standar”, Koordinator Analisa dan Penanganan Kasus berkoordinasi dengan guru pendidikan karakter/agama untuk memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang terduga rentan terhadap ekstremisme kekerasan melalui *setting* pengajaran (diskusi, dialog, pendidikan toleransi dsb) atau merujuk kepada pimpinan sekolah/madrasah untuk berdiskusi dan berdialog jika kasus terjadi di level guru sederajat.

Langkah 5

Jika kasus tidak dapat diselesaikan dalam lingkup sekolah/madrasah karena membutuhkan kompetensi khusus untuk mendapatkan asesmen dan intervensi lanjutan, maka Koordinator Hubungan Masyarakat merujuk kasus tersebut ke Komite Gabungan atau dirujuk ke Jejaring Eksternal jika hasil putusan Komite RANGKUL di sekolah/madrasah memutuskan bahwa dugaan perilaku rentan tersebut tidak bersumber dari masalah ideologi ekstremisme kekerasan, namun hal lain.

Komite Gabungan

Tugas pokok dan fungsi

Tugas Pokok dan fungsi Komite Gabungan adalah merencanakan, menjalankan dan mengevaluasi penanganan lanjutan atas kasus yang dirujuk oleh Komite RANGKUL di sekolah/madrasah

Komite Gabungan bertanggung jawab untuk:

- Berkoordinasi berkala dengan Komite RANGKUL di sekolah dan madrasah
- Memastikan keterwakilan dari setiap lembaga/agensi dalam agenda-agenda Komite Gabungan
- Menjaga hubungan agar koordinasi dan kerjasama antaranggota kelompoknya bisa terjalin dengan baik
- Memastikan dukungan bagi Komite RANGKUL dalam proses identifikasi kasus melalui keterlibatan tim ahli di Komite
- Memastikan besaran dan dimensi dari risiko dari perilaku yang diduga sebagai bagian dari ekstremisme kekerasan akan teridentifikasi, dan bahwa yang bersangkutan akan mendapatkan tindakan intervensi yang sesuai
- Memastikan bahwa tindakan intervensi yang harus dilakukan diberikan dengan tepat, dan bahwa persetujuan partisipan sudah didapatkan sebelumnya.
- Memastikan bahwa setiap individu/organisasi yang dalam Komite Gabungan akan berkontribusi sesuai peran masing-masing dalam rangka memastikan intervensi yang diberikan akan efektif.

Komposisi

Komite Gabungan terdiri dari jejaring tiga pihak. Pertama, pihak otoritas yang berwenang dalam hal menangani isu ekstremisme kekerasan serta pihak Dinas Pendidikan setempat. Kedua, pihak orang tua. Ketiga, tokoh masyarakat/agama dan organisasi masyarakat serta pihak Komunitas-komunitas setempat yang berkepentingan untuk memastikan agar hak-hak anak dan sekolah tidak tercederai sepanjang pelaksanaan program ini.

Mekanisme kerja

- Komite Gabungan dapat berlokasi di salah satu agensi atau institusi anggotanya, namun Ketua Komite Gabungan harus dapat memastikan adanya pertemuan berkala.
- Setiap laporan asesmen harus disampaikan ke seluruh anggota agar semuanya dapat berkontribusi. Adapun mekanisme penyampaian serta penentuan prioritas dapat disusun dengan mengacu pada Perpres tentang PE yang akan dikeluarkan kemudian.
- Pertemuan-pertemuan Komite Gabungan bertujuan menentukan besaran risiko terkait apakah seseorang:
 - Rentan masuk dalam kegiatan ekstremisme kekerasan, sehingga sudah layak mendapatkan intervensi PE
 - Perlu mendapatkan intervensi yang lain, selain PE
 - Dapat dikeluarkan dari daftar kasus yang masuk proses PE oleh Komite Gabungan
- Dalam mempertimbangkan risiko ini, Komite Gabungan perlu memikirkan juga:
 - Risiko yang dihadapi individu karena masuk dalam lingkaran terorisme
 - Risiko yang dihadapi masyarakat dengan masuknya individu tersebut ke dalam lingkaran terorisme
- Setiap kasus diproses dengan selalu mempertimbangkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dan tersedia agar dapat menentukan bentuk intervensi yang paling tepat, tanpa melakukan diskriminasi atas agama, gender, suku atau latar belakang individu terkait.
- Seluruh proses, keputusan dan tindakan yang dilakukan Komite harus dicatat dengan rapi dan catatannya harus dapat diakses oleh setiap anggota. Data kasus juga harus disimpan dalam jangka waktu tertentu sepanjang kasus masih terbuka dan beberapa waktu setelah ditutup.

Rencana intervensi

- Setiap kasus akan ditangani secara terpisah, dimana setiap individu yang diputuskan perlu mendapat intervensi, akan menerima bantuan lengkap yang didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan yang bersangkutan sesuai hasil identifikasi risikonya. Dengan menggunakan seluruh informasi yang tersedia dan dimiliki, Komite Gabungan akan mendesain intervensi yang menyeluruh termasuk asesmen dan mitigasi risiko yang berpotensi dihadapi oleh pihak pemberi intervensi.
- Desain intervensi yang diberikan oleh Komite Gabungan meliputi tahap-tahap berikut:
 - Menyiapkan rencana bagi mitra atau organisasi yang dianggap oleh Komite tepat untuk memberikan intervensi;
 - Menyiapkan instrumen intervensi yang diperlukan sebagaimana dinyatakan dalam rencana intervensi sesuai persetujuan bersama;
 - Melakukan *review* program intervensi;
 - Merevisi atau menghentikan intervensi bilamana dianggap perlu;
 - Menjalankan asesmen lanjutan bilamana dianggap perlu, atau ketika persetujuan pemberian intervensi ditolak atau dibatalkan oleh penyedia intervensi
- Risiko yang tercakup dalam konteks PE ini meliputi risiko bagi individu, risiko bagi masyarakat, dan risiko bagi organisasi atau mitra penyedia intervensi. Komite Gabungan bertanggung jawab untuk mengelola risiko-risiko ini dalam kaitannya terhadap individu yang dianggap rentan ekstremisme kekerasan.
- Intervensi dukungan pencegahan ekstremisme kekerasan ini sangat mungkin melibatkan beberapa agensi sekaligus, dimana tiap agensi akan memiliki risikonya masing-masing, dan oleh karena itu Komite Gabungan perlu mengantisipasi semua risiko yang mungkin terjadi dalam desain intervensinya.
- Risiko utama dalam intervensi ini ada di tangan pihak kepolisian karena mereka memang bertugas dan berwenang menangani kasus terorisme di negeri ini. Oleh karena itu, Kepolisian dan BNPT sebagai institusi negara yang khusus menangani terorisme, menjadi bagian yang sangat penting dalam kerja Komite Gabungan.

Persetujuan partisipasi

- Keikutsertaan dalam program Intervensi PE bagi individu yang sudah terkonfirmasi “**waspada**”, “**mengkhawatirkan**” atau “**bahaya**” ini bersifat sukarela. Oleh karena itu, sebelum prosedur intervensi dimulai, individu (atau orang tua/wali dari individu jika belum cukup umur) diminta untuk menandatangani persetujuan intervensi sebelumnya. Setiap individu yang mendapatkan bantuan intervensi program PE ini harus menyadari bahwa program PE ini bertujuan mencegah individu untuk terlibat dalam aksi ekstremisme kekerasan; apa tujuan program serta apa hasil yang diharapkan dari program ini.
- Sebagai bagian dari menjaga kualitas program, segala informasi yang terkait dengan individu terduga berisiko akan dibagikan kepada anggota Komite Gabungan dan mitra kerjanya, termasuk pihak Kepolisian. Individu (atau orangtua/wali) harus dimintai persetujuannya mengenai hal ini.
- Ketika persetujuan orang tua/wali tidak didapatkan, terutama ketika risiko yang dibawa oleh individu terduga rentan justru berasal dari lingkungan rumah, maka pihak Dinas Sosial setempat harus dilibatkan untuk mendapatkan persetujuan ini, terutama ketika risiko yang diidentifikasi melibatkan mental, fisik, emosi, inteligensi, sosial dan perilaku.

Monitoring dan Evaluasi

- Komite Gabungan bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring intervensi. Individu yang masuk dalam program intervensi harus menjalani asesmen ulang selama sekurang-kurangnya setiap tiga bulan. Bilamana diperlukan asesmen dilakukan lebih sering untuk melihat efektivitas intervensi serta menjadi masukan bagi Komite dalam menentukan kelanjutan intervensi.
- Bilamana Komite merasa tidak puas atas intervensi yang dilakukan selama ini, yaitu bahwa risiko yang dialami individu tidak berkurang, maka kasus ini dapat ditinjau ulang dan rencana intervensi baru dapat disusun kembali. Jika risikonya memang diduga membesar, maka Komite Gabungan dapat mempertimbangkan apakah kasus ini memang tidak sesuai lagi ditangani oleh Komite Gabungan program PE, dan penanganan sepenuhnya oleh Kepolisian sudah diperlukan.
- Bilamana Komite Gabungan merasa puas atas hasil intervensi yang dilakukan mitra, yaitu bahwa risiko yang teridentifikasi sebelumnya telah berkurang atau hilang, maka Komite Gabungan dapat merekomendasikan agar program intervensi ini dihentikan.

Pendanaan

Komite Gabungan secara kolektif bertanggung jawab atas perancangan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi Intervensi, namun tidak bertanggung jawab atas pendanaan mitra yang memberikan intervensi. Hal ini sebaiknya diatur lagi dalam Perpres PE, yaitu terkait pendanaan kerja Komite Gabungan dan Mitra penyedia intervensi.

Kerjasama Jejaring

Dalam proses kerjanya, Komite Sekolah/Madrasah, Jejaring Eksternal dan Komite Gabungan akan saling bertukar informasi terkait individu yang teridentifikasi berisiko rentan. Demi menjaga kredibilitas dan validitas program, proses pertukaran informasi ini sebaiknya dibuat berdasarkan protokol pertukaran informasi yang disusun bersama, demi memastikan efektivitas program dan kontribusi dari tiap pihak optimal.

Jejaring Eksternal

Jejaring Eksternal adalah perwakilan dari lembaga sosial, komunitas dan instansi pemerintah yang fokus pada upaya pemenuhan hak-hak anak dan kesehatan mental misalnya KPAI, Dinas Sosial, BNN, HIMPSI dll.

Proses RANGKUL

Program “RANGKUL” selain memiliki arti mendekatkan diri, juga merupakan akronim dari tahapan deteksi dan respon dini:

Respon dan Rehabilitasi

Tahap awal adalah **Respon** yang berarti siswa, guru dan komite RANGKUL di sekolah/madrasah tanggap terhadap tanda-tanda rentan ekstremisme kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah/madrasah. Namun, perlu diperhatikan baik-baik bahwa responsif tidak berarti tergesa-gesa dalam melakukan justifikasi. Empati dan mengesampingkan prasangka menjadi kunci awal untuk mengenali dan merespon tanda-tanda rentan ekstremisme kekerasan (lihat bagian E 3a poin 3) langkah 2) . Tahap ini juga menjadi titik akhir dari proses RANGKUL yaitu dengan melakukan **Rehabilitasi** terhadap komunitas sekolah/madrasah yang telah mendapatkan intervensi atau penanganan lebih lanjut oleh Komite Gabungan di luar sekolah/madrasah. Rehabilitasi dimaksudkan sebagai proses pendampingan agar komunitas sekolah/madrasah tersebut mampu beradaptasi kembali dengan lingkungan sekolah/madrasah.

Analisis

Pada tahap ini, Komite RANGKUL melakukan identifikasi dan uji sahih terhadap laporan tanda-tanda rentan ekstremisme kekerasan yang diterima Komite atau yang ditemukan sendiri oleh anggota Komite. Komite RANGKUL menggunakan instrumen asesmen standar berupa observasi dan wawancara kepada terduga perilaku rentan atau kepada pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu.

Narasikan

Komite RANGKUL menarasikan hasil dari asesmen awal dalam bentuk laporan deskriptif secara lengkap mengenai status siswa yang diduga rentan.

Gali

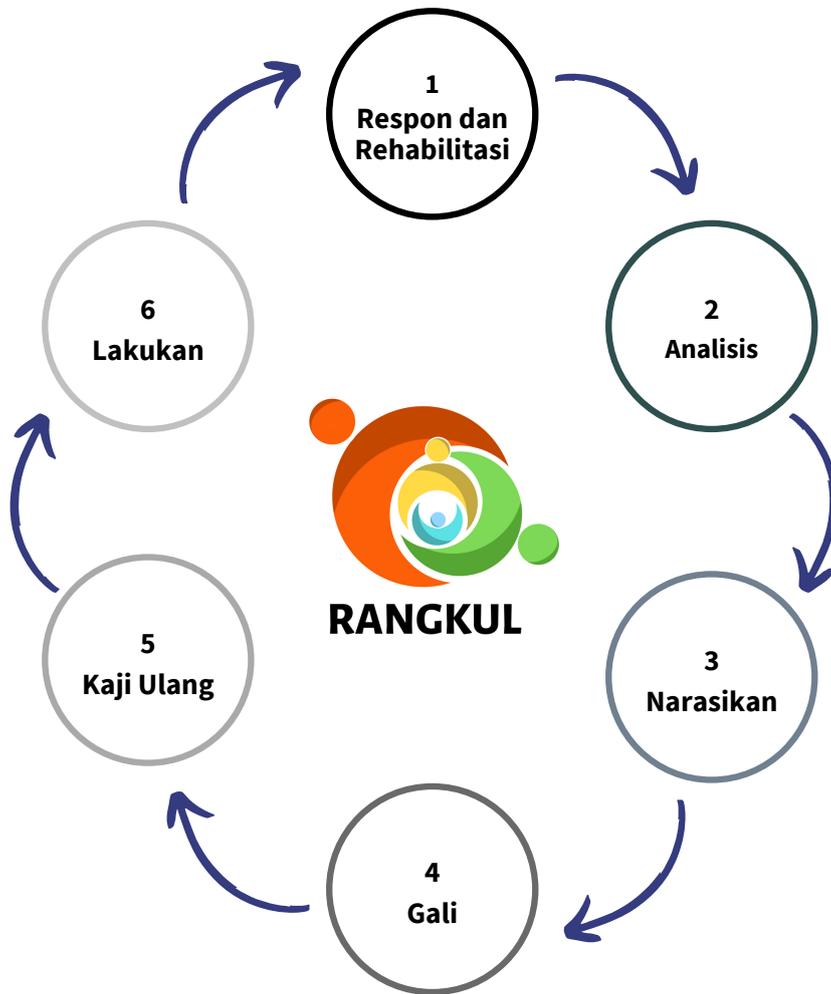
Laporan yang dirujuk ke Komite Gabungan kemudian digali lebih lanjut oleh profesional untuk lebih mendalami gejala spesifik dari perilaku rentan tersebut. Hasil asesmen tersebut berupa konfirmasi laporan Komite RANGKUL. Jika laporan tersebut terkonfirmasi, maka laporan tersebut akan diproses lebih lanjut oleh Komite Gabungan, namun jika laporan tersebut tidak terkonfirmasi, maka kasus tersebut akan dikomunikasi kembali ke Komite RANGKUL atau dirujuk langsung ke Jejaring Eksternal.

Kaji Ulang

Komite Gabungan melakukan rapat untuk memutuskan intervensi atau penanganan yang sesuai dengan tetap mempertimbangkan saran dan pandangan dari seluruh pihak yang terkait. Hal ini dimaksudkan agar intervensi atau penanganan diberikan secara holistik dan tetap memperhatikan hak-hak siswa.

Lakukan

Tahap terakhir dari proses RANGKUL adalah merujuk siswa yang terduga rentan ini ke pihak yang dianggap akan lebih mampu memberikan intervensi yang dibutuhkan untuk mencegah yang bersangkutan terlibat lebih jauh dalam ekstremisme kekerasan. Pada tahap ini, intervensi atau penanganan yang diberikan sesuai dengan hasil keputusan Komite Gabungan. Komite Gabungan dan Komite RANGKUL di sekolah/madrasah harus secara aktif berkomunikasi dan secara bersama-sama memantau perkembangan hasil intervensi tersebut.



Gambar 5. Alur proses rangkul

Baca Lebih Lajut

- Awan, I. (2012). "I Am a Muslim Not an Extremist": How the Prevent Strategy Has Constructed a "Suspect" Community. *Politics & Policy*, 40(6), 1158–1185. <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2008.01.010>.
- Center for Research and Evidence on Security Threats. (2017). *Introductory Guide: Countering Violent Extremism*. Diunduh dari http://eprints.lancs.ac.uk/88097/1/17_008_01.pdf.
- Center for Research and Evidence on Security Threats. (2019). *Countering Violent Extremism II: A Guide to Good Practice*. Diunduh dari <https://crestresearch.ac.uk/download/6886/>.
- Cole, J., Alison, E., Cole, B. and Alison, L. (2010) *Guidance for Identifying People Vulnerable to Recruitment into Violent Extremism*. Liverpool: University of Liverpool, School of Psychology.
- Egan, V., Cole, J., Cole, B., Alison, L., Alison, E., Waring, S., & Elntib, S. (2016). Can you identify violent extremists using a screening checklist and open-source intelligence alone? *Journal of Threat Assessment and Management*, 3(1), 21-36. <http://dx.doi.org/10.1037/tam0000058>.
- Ministry of Education Science and Technology Kosovo. (2018). *Prevention of Violent Extremism: Teachers' Manual*. Diunduh dari <http://www.ks.undp.org/content/dam/kosovo/docs/PVE/Prevention%20of%20Violent%20Extremism%2019%2006%202018%20for%20web.pdf>.
- Nettleton, L., Mattei, C. & Zeiger, S. (2019). *Projecting the Impact of A Program on Preventing Violent Extremism Through Education in Uganda*. Diunduh dari <http://www.hedayahcenter.org/Admin/Content/File-2112019155147.pdf>.
- RAN EDU. (2016). EX POST PAPER: 'Empowering and supporting teachers' 'Pedagogical role requires time and training'. Diunduh dari https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-edu/docs/ran_edu_empowering_and_supporting_teachers_gothenborg_24-25022016_en.pdf.
- RAN EDU. (2018). *Transforming schools into labs for democracy: A companion to preventing violent radicalisation through education*. Diunduh dari https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-edu/docs/ran_edu_transforming_schools_into_labs_for_democracy_2018_en.pdf

- Stephens, W., Sieckelinck, S., & Boutellier, H. (2019). Preventing Violent Extremism: A Review of the Literature. *Studies in Conflict & Terrorism*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2018.1543144>
- UNDP .(2016). Preventing violence extremism through promoting inclusive development, tolerance and respect for diversity: A development respond to addressing radicalization and violent extremism. USA: UNDP.
- UNESCO. (2016). A Teacher’s Guide on the Prevention of Violent Extremism. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2017). Preventing Violent Extremism through Education: A Guide for Policy-Makers. Paris: UNESCO.
- Trip S, Bora CH, Marian M, Halmajan A and Drugas MI (2019) Psychological Mechanisms Involved in Radicalization and Extremism. A Rational Emotive Behavioral Conceptualization. *Front. Psychol.* 10:437. doi: 10.3389/fpsyg.2019.00437

Kontak dan Informasi

PPIM Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

E-mail : ppim@uinjkt.ac.id

Phone 1 : (021) 742 3543

Phone 2 : (021) 7499 272

Mobile : (021) 740 8633

Alamat : Jl. Kertamukti No. 5, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan,
Banten 15419



Jl. Kertamukti No. 5, Pisangan Barat, Ciputat Timur
Tangerang Selatan, Banten 15419
ppim@uinjkt.ac.id
<https://ppim.uinjkt.ac.id>